

# Vonis Ringan Membuat Pelaku Bebal

Pelanggaran distribusi pangan terus saja terjadi tanpa memedulikan hak konsumen.

Nesty Trioka Pamungkas

**R**IBUAN produk pangan tanpa izin edar ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Tidak hanya itu, produk kedaluwarsa, berizin fiktif, dan tanpa label berbahasa Indonesia bagi produk impor pun marak dijual.

Produk tersebut ditemukan dalam operasi gabungan nasional yang digelar Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) dengan beberapa pihak terkait secara serentak di seluruh Indonesia. "Pada H-3 jelang Lebaran hari Selasa (7/9) kita adakan operasi khusus. Hasilnya ditemukan 1.481 item dengan jumlah 621.361 buah yang masuk dalam operasi," ujar Kepala Badan POM Kustantinah di Jakarta, kemarin.

Sejumlah temuan tersebut terbagi dalam produk tanpa izin edar (TIE) yang dikeluar-

kan Badan POM, produk kedaluwarsa, produk dengan izin edar fiktif, dan produk impor tidak berlabel bahasa Indonesia. Dari temuan, mayoritas merupakan produk makanan ringan seperti permen, sirup, dan minuman seperti susu yang kebanyakan impor dari Malaysia dan China.

"Sebanyak 58,8% dari hasil temuan kita adalah produk pangan tanpa izin edar, termasuk di dalamnya pangan impor ilegal tanpa label bahasa Indonesia. Yang kedaluwarsa mencapai 36,5% dari hasil temuan yang ada. Produknya bervariasi, tetapi mayoritas sirup, makanan ringan, permen, susu, dan agar-agar," jelas Kustantinah.

Operasi gabungan nasional dilakukan di sarana-sarana distribusi produk seperti toko kelontong, pasar, minimarket, swalayan, supermarket, hiper-



**RAZIA MAKANAN:** Petugas gabungan dari Polda Metro Jaya dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) merazia sejumlah produk makanan dan minuman di Pusat Perbelanjaan Carrefour Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (19/8).

tor. "Kita lakukan di toko-toko modern sampai tradisional di Jakarta, Makassar, Semarang, Pekanbaru, Surabaya, dan kota lainnya. Paling banyak ditemukan di Jakarta, yakni 48 item 550 ribu buah."

Hasil temuan itu, kata Kustantinah, disita serta ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut dapat berupa pemberian sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Hal itu dapat dilihat dari belasan kasus yang diajukan ke

meja pengadilan.

"Kita tindak lanjuti dengan memberi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Selama tahun 2010 ada 18 kasus yang kita majukan ke jalur hukum. Sebanyak 7 kasus produk tanpa izin edar, 11 kasus produk kedaluwarsa," ungkapnya.

Dari kasus tersebut, ada yang sudah pada tahap putusan pengadilan. Namun putusannya cenderung ringan, yakni pidana 1,5 tahun sehingga tidak cukup untuk membuat pelang-

garan, menurut Kustantinah, menciptakan bebala pelaku. "Denda paling berat saja Rp1,5 juta dan di UU sanksi kurungan penjara paling 2 tahun, ini tidak membuat efek jera," tandasnya.

**Beda persepsi**

Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman Indonesia Suroso Natakusuma. Menurutnya, sanksi hukum yang ada saat ini masih lemah. Belum ada

persepsi yang sama untuk menindaklanjuti pelanggaran.

"Yang ada hanya persepsi atau keyakinan hakim yang menangani perkara. Selama ini yang dipakai UU Pangan tahun 1996, itu hukumnya 2 tahun dengan denda Rp200 juta. Terus ada UU Perlindungan Konsumen tahun 1999, hukumnya 5 tahun dengan denda Rp2 miliar. Kami desak segera diadakan pertemuan antara Badan POM dan penegak hukum seperti Mahkamah Agung untuk mengkaji ulang peraturan

yang digunakan untuk ini," seru Suroso.

Sanksi hukum yang tinggi harus diterapkan, bukan semata-mata karena jatuhnya korban, melainkan ada aspek perlindungan konsumen yang mengonsumi produk tersebut. Soal dampak, menurutnya, baru dapat dilihat dalam waktu lama. "Bukan masalah ada korban terus ada yang meninggal, tapi ini melindungi konsumen." (H-1)

nesty@mediaindonesia.com

## Hasil Pengawasan Pangan Tahun 2010 BPOM Periode Operasi Gabungan Nasional 2010

● Jumlah sarana yang diinspeksi	: 348
● Jumlah sarana yang tidak memenuhi ketentuan	: 187
● Jumlah sarana yang memenuhi ketentuan	: 161

### Hasil Temuan

● Produk tanpa izin edar (ilegal)	: 872 item
● Kedaluwarsa	: 541 item
● Rusak	: 52 item
● Label tanpa bahasa Indonesia	: 872 item
● Mengandung bahan berbahaya	: 14 item



Sumber: BPOM RI/GRAFIS:TIYOK

## Kampung TKI Bersolek

**J**ALAN menuju kampung itu cukup terjal. Aspal yang tidak mulus dan titik lubang ditemui di jalan menuju kampung itu. Bahkan, di kanan dan kiri jalan kampung itu terdapat jurang yang curam.

Kampung itu semakin terpencil lantaran berada di ujung perbukitan. Meski begitu, kampung itu memberangatkan banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) sehingga dijuluki kampung TKI.

Mereka tersebar di beberapa desa di Kecamatan Gumelar, Banyumas, Jawa Tengah

(Jateng). Dari data Kecamatan Gumelar, sedikinya 2.100 TKI yang resmi terdaftar dan kini bekerja di luar negeri dari kampung TKI itu.

Lantaran kental dengan julukan kampung TKI, tidak perlu kaget jika rumah-rumah mereka berbeda jauh dengan kondisi jalan yang rusak. Semua rumah mereka sudah modern seperti bertembok semen dan dilengkapi antena parabola untuk menangkap saluran televisi.

Tidak hanya rumah yang mentereng. Banyak di antara mereka yang memiliki sepeda

motor atau mobil yang cukup mewah, seperti mobil jenis Toyota Fortuner yang harganya bernilai ratusan juta rupiah. Pemandangan itu antara lain terlihat di Desa Cihonje, Gumelar, dan Tlaga.

"Apalagi saat ini menjelang Idul Fitri, banyak TKI pulang kampung dan mereka berlomba-lomba tampil beda, seperti rumah, kendaraan, hingga penampilan pribadi," tutur Nasirah, 33, TKI yang baru saja pulang dari Taiwan.

Nasirah mengaku, setelah 7 tahun bekerja di Taiwan, dirinya sudah mampu membangun rumah permanen seluas 8x15 m bergaya modern dan berlantai keramik. Rumah itu dibangun dari gajinya, Rp5 juta per bulan. "Tepat Idul Fitri ini, kami sudah merasakan rumah baru ini."

Bagi Nasirah dan warga Gumelar lainnya, di saat Idul Fitri-lah mereka bakal kedatangan tamu, termasuk kerabatnya dari jauh. Mereka ingin tampil beda dan jaga gengsi. Bahkan, tidak ingin perabot atau rumahnya masih tetap sama dengan Lebaran tahun sebelumnya. (Lilie Dharmawan/H-3)



MULIEK DHARMAWAN

**RUMAH BARU:** Pekerja mengecat plafon rumah baru Nasirah, TKI warga Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Banyumas, Jawa Tengah.


## SEKILAS

### Dua BUMN Dipastikan Mengelola SJSN

PEMERINTAH akhirnya hanya menunjuk dua perusahaan asuransi badan usaha milik negara (BUMN) sebagai Badan Pelaksana Jaminan Sosial Nasional (BPJS). Kedua BUMN itu adalah PT Asuransi Kesehatan (PT Askes) dan PT Jamsostek. Mereka akan menjalankan amanah UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk mengelola asuransi sosial bidang kesehatan pada seluruh warga Indonesia (*universal coverage*). "Kita putuskan menunjuk dua BUMN. Untuk opsi jaminan kesehatan nasional yang akan diperluas, kita usulkan dibentuk BPJS baru, sehingga nantinya tidak lagi dikelola pemerintah (Kemenkes)," kata Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono kepada pers sesuai rapat koordinasi tingkat menteri, di Jakarta, kemarin. Agung menambahkan, lantaran bidang kesehatan dinilai paling siap, bidang SJSN yang akan dijalankan terlebih dahulu akan diprioritaskan pada bidang kesehatan. (Tlc/H-3)

### Festival Keraton Dunia Terkendala Dana

FESTIVAL Keraton Dunia yang rencananya digelar pada 26 September 2010 di Pura Mangkunegaran, Solo, terpaksa ditunda karena terkendala dana yang belum cair sebesar Rp2 miliar. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo Purnomo Subagyo, persiapan dalam menggelar Festival Keraton Dunia yang terlalu dekat dengan waktu pelaksanaan menyebabkan dana untuk akomodasi dan transportasi 70 peserta kerajaan (20 raja internasional dan 50 raja di Indonesia) belum tersedia. "Persiapan baru Juli 2010, sehingga belum ada kesiapan dana dari berbagai pihak, baik instansi terkait maupun sponsor," kata Purnomo, di Solo, Jateng, kemarin. Purnomo mengatakan, dana Rp2 miliar itu 20%-nya dianggarkan dari anggaran pendapatan belanja daerah, dan 80%-nya didapat dari sponsor. Pihak sponsor, kata Purnomo, hingga saat ini belum ada yang memberi kepastian untuk bekerja sama. (Ant/H-3)



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Jend. Gatot Subroto No. 40-42  
 Jakarta 12190  
 Kotak Pos 124

Telepon 5250208-5251609  
 Faksimili 5262880  
 Website www.pajak.go.id

## PENGUMUMAN

**NOMOR: PENG- 04 /PJ.09/2010**

**TENTANG**

**KOMITMEN MENERAPKAN NILAI-NILAI ORGANISASI**

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Sebagai komitmen menerapkan nilai-nilai organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang disebut dengan "DJP Maju, PasTI" (Profesionalisme, Integritas, Teamwork, dan Inovasi), maka Pimpinan dan seluruh jajaran Pegawai Direktorat Jenderal Pajak tidak akan menerima dan/atau meminta hadiah, bingkisan atau gratifikasi dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung, dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berhubungan dengan berbagai tugas dan pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak mengucapkan terima kasih atas pengertian dan dukungan yang diberikan oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga nilai-nilai organisasi tetap menjadi landasan setiap pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Demikian, atas perhatian seluruh masyarakat, kami mengucapkan terimakasih.

Jakarta, 08 September 2010  
 Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas

t.t.d

M. Iqbal Alamsjah  
 NIP 060060216